



**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Mengamati pelaksanaan Program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat 6 (enam) program dan 40 (empat puluh) kegiatan, setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan dengan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang jauh berbeda dengan usulan Rancangan Renja dan adanya penggabungan program di Sekretariat dari 2 (dua) program menjadi 1 (satu) program. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali digabung menjadi satu program dengan nama Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali digabung. Selain itu, terdapat beberapa perubahan nama program di beberapa bidang yaitu, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berubah menjadi Program Peningkatan Pengawasan Koperasi, Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi berubah menjadi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi. Pada Rancangan Renja kegiatan Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM yang terdapat pada program UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali semula digabung dalam Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, di Rancangan Akhir kegiatan Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM terpisah dengan Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjadi Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM.

Akhirnya seraya mengharapkan sumbangan pemikiran dari kita semua maka Rancangan Akhir Renja yang telah disusun ini kami ajukan sebagai dasar Perencanaan Program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali guna menjadi landasan operasional dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2019.

Denpasar , Juli 2018

Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali

I GEDE INDRA DEWA PUTRA, SE., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19641226 198603 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2019	8
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Renja	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
Bab IV Renacana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	29
Bab V Penutup	30
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Provinsi Bali memiliki peran penting dalam menumbuhkan koperasi, usaha dan Menengah (KUMKM) di Provinsi Bali. Kontribusi sektor KUMKM ini terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sangat besar dan sebagai salah satu sektor unggulan. KUMKM ini mampu menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar. KUMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan KUMKM selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah menjadikannya sebagai pertumbuhan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran KUMKM maka upaya pemberdayaan KUMKM dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah dan pusat serta peningkatan daya saing produk KUMKM, perlu difokuskan pada penanganan 2 (dua) isu strategis yaitu, pertumbuhan usaha dan daya saing.

Permasalahan yang dihadapi KUMKM adalah rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Meskipun jumlah KUMKM di Bali sangat banyak, namun masih perlu program pembinaan terutama dalam pemberdayaan pelaku KUMKM yang belum maksimal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi KUMKM maka, penting dilakukan kajian tentang pemberdayaan KUMKM melalui program binaan di Provinsi Bali. Kajian tersebut diharapkan nantinya dapat mengevaluasi berbagai program dan kegiatan sekaligus memberikan solusi dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang mendapat predikat Provinsi Penggerak Koperasi dari Pemerintah Pusat. Faktor kunci diraihnya predikat tersebut adalah keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap koperasi. Salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di samping itu Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki berbagai potensi/keunggulan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan



pendapatan. Untuk meningkatkan PAD dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya, seperti : menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sesuai dengan pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan bahan masukan untuk Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019. Melalui Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disempurnakan menjadi Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selanjutnya sebagai bahan Musrenbang RKPD. Setelah RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah maka, Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disempurnakan selanjutnya dikirim Kepada Bappeda Litbang Provinsi Bali untuk diverifikasi. Bila hasil verifikasi dari Bappeda Litbang Provinsi Bali memandang bahwa Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan RKPD, maka Bappeda Litbang Provinsi Bali mengirim Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali ke Gubernur melalui Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 987 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali 2019. Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2019 diawali dengan mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



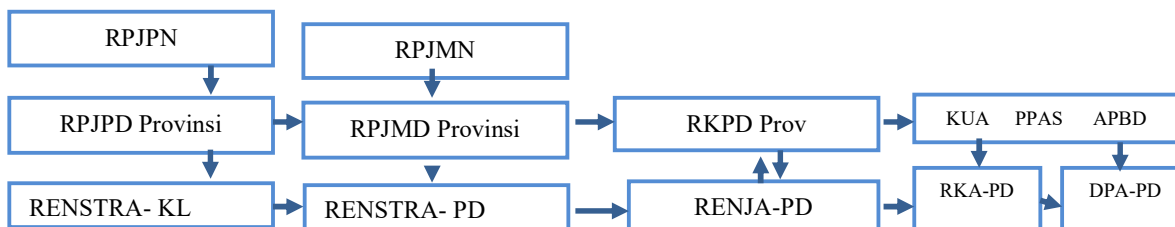
Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Litbang Provinsi Bali. Materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusun Renja Perangkat Daerah, dan kesiapan data SIPD. Bersamaan dengan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Tim menyusun agenda kerja dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi Tim.

Rancangan Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi bahan Musrenbang RKPD. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi diatur dalam pasal 90-93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bappeda Litbang melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD provinsi. Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Penyelarasan-penyelarasan program dan kegiatan provinsi dengan program dan kegiatan prioritas pemerintah yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan/atau penyelarasan program kabupaten/kota dengan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan. Hasil Musrenbang RKPD Provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir. Hasil Musrenbang RKPD Provinsi adalah Rancangan Akhir RKPD Provinsi. Kepala Perangkat Daerah menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Akhir RKPD sehingga hasil Musrenbang RKPD juga menjadi bahan acuan dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 maka Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Akhir Renja dengan menyesuaikan Rancangan Akhir Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada gambar di atas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada perubahan RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi, dengan mengacu pada Renstra PD, Renja PD dan KUA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan dalam DPA PD yang merupakan penjabaran dari APBD.

1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
- 12) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- 29) Peraturan Daerah Provinsi Bali No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
- 31) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- 32) Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Provinsi Bali.
- 33) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD maka maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2019 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2019 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2019 dan setelah RKPD ditetapkan maka Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2019 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2019
- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2019
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 dengan RKPD tahun 2019



- 5) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja
- 6) Tujuan tersusunnya Renja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang dan UPT lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

Sedangkan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yaitu mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019

Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I diuraikan tentang : a) Latar Belakang, b) Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, c) Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. d) Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini diuraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali,
- 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali,
- 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas



Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 4) Review terhadap Rancangan Renja, dan 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Bab III Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Bab IV Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang Rencana Kerja dan Kebutuhan dengan Pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini diuraikan antara lain catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN LALU

Dalam Bab II tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2017 melaksanakan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar; dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap dinyatakan sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah:

- a. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :
 - Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
 - Melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas



- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2017, komposisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	15
3	Strata 1	24
4	Diploma III	3
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	16
7	SLTP / Sederajat	-
8	SD	-
Total		58

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	14
2	Golongan III	33
3	Golongan II	11
4	Golongan I	-
Total		58

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan-Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
Total		25



Tabel 2.4
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	6,530 m2
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	4 unit
3	Kendaraan Operasional Roda 4	11 unit
4	Kendaraan Operasional Roda 2	27 unit
5	Meja Kerja	107 buah
6	Kursi Kerja	66 buah
7	Komputer	32 unit
8	Printer	24 unit
9	Filling Cabinet	24 unit
10	Lemari Besi/Kayu	29 unit
11	Rak Kaca/Kayu	25 unit
12	Air Conditioner (AC)	56 unit
13	Alat Kantor Lainnya	29 set
14	Zice	1 unit
15	Alat-alat Rumah Tangga/Lain-lain	11 unit

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali periode 2013-2018 yaitu : **“Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali Mandara)”** maka ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu :

1. Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern.
2. Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman.
3. Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batin.

Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada misi ke 3 (tiga) : Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batin. Dengan sasaran yang ke 1 (satu) yaitu terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh dengan strategi melalui peningkatan investasi, pengembangan industri kecil, koperasi dan UMKM, dengan arah kebijakan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang melaksanakan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2013-2018 menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis.

Provinsi Bali dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali melaksanakan 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan secara detail berikut ini :



Tabel 2.5
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2017

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	797.337.400	717.006.118	96,71	Persentase Layanan Administrasi yang ditangani	(%)	100	100	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	100	Tersedianya jasa surat menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tertangani	100	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.910.00,00	228.271.936,00	83,95	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik	12	12	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.219.200,00	65.274.200,00	87,95	Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi, terpenuhinya administrasi kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi, terpenuhinya administrasi kantor	12	12	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.295.000,00	26.251.400,00	99,83	Pencetakan, penggandaan dan foto copy surat-surat dapat dilaksanakan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	100
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.980.200,00	11.934.000,00	99,61	Tersedianya komponen listrik	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12	12	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.680.000,00	28.680.000,00	100	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	100



No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.025.000,00	29.400.000,00	94,76	Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam daerah	257.978.000,00	234.319.582,00	90,83	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	12	12	100
9	Upacara Keagamaan	93.000.000,00	90.625.000,00	97,45	Terlaksananya upacara agama	Jumlah bulan pelaksanaan upacara agama	12	12	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.730.551.040	1.651.052.319	97,32	Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana yang ditangani	(%)	100	100	100
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	643.854.028,00	642.227.320,00	99,75	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah bulan tersedianya biaya tenaga kontrak dan peralatan gedung kantor	12	12	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	100	Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan baik	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	12	12	100
12	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	385.702.000,00	385.701.248,00	99,99	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	12	12	100
13	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	673.145.012,00	595.443.751,00	88,46	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak	Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, terlaksananya pembayaran honorarium tenaga	12	12	100



No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kontrak			
14	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	10.750.000,00	10.580.000,00	98,42	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100
III	Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	165.462.700	153.876.895	93	Prosentase koperasi yang mendapat pembiayaan	(%)	3,7	3,8	102,7
					Persentase UKM yang mendapat pembiayaan	(%)	8	8	100
15	Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	85.427.400	82.516.995	96,49	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan	Koperasi	50	50	100
16	Pembinaan UKM Akses Sumber Pembiayaan	80.035.300	71.359.900	89,16	Jumlah UKM yang mengetahui sumber pembiayaan	UKM	50	50	100
IV	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	296.233.000	291.084.015	98,33	Jumlah Peningkatan Koperasi berprestasi	Koperasi	18	36	200
17	Penilaian Kesehatan Koperasi	95.804.600	94.788.050	98,94	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Koperasi	18	36	200
18	Pemantauan dan Pengawasan Koperasi	105.534.300	102.499.544	97,12	Jumlah koperasi yang diawasi	Koperasi	10	10	100
19	Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	94.884.100	93.796.421	98,85	Jumlah koperasi yang patuh peraturan perkoperasian	Koperasi	42	42	100
V	Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi	660.148.660	623.059.664	95	Jumlah Peningkatan Koperasi	Koperasi	100	106	106
20	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	109.959.100	103.368.850	94,01	Jumlah buku informasi data koperasi	Buku	100	100	100
					Jumlah koperasi NIVO Provinsi yang datanya dimutakhirkan	Koperasi	40	40	100



No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Meningkatnya koordinasi pendataan pemberdayaan koperasi	Orang	60	100	100
21	Dukungan Penguatan Peran Dekopinwil Provinsi Bali	158.098.760	155.402.514	98,29	Terbinanya jumlah koperasi binaan Dekopinwil Provinsi Bali	Koperasi	110	110	100
22	Pembinaan dan Penghargaan Koperasi yang berkinerja dengan baik	392.090.800	364.288.300	92,91	Jumlah koperasi yang berkinerja dengan baik	Koperasi	18	18	100
					Tokoh koperasi	Orang	5	5	100
					Audisi koperasi siswa se Bali	Sekolah	3	3	100
					Jumlah koperasi yang direvitalisasi	Koperasi	9	9	100
VI	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.154.063.320	5.957.313.780	96,13	-Jumlah KUKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya	KUKM	56	63	112,5
					-Jumlah Koperasi yang SDM Pengelolanya berkompeten	Koperasi	450	550	122,2
23	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha	87.203.00,00	81.497.100,00	93,46	Terlaksananya sosialisasi penumbuhan wirausaha baru dan bintek peningkatan keterampilan UKM	UKM	140	140	100
24	Penyelenggaraan Promosi Produk UKM	191.583.500,00	180.139.500,00	94,03	Jumlah UKM yang melakukan promosi produk	UKM	6	6	100
25	Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah	536.628.720,00	529.417.350,00	98,66	Terlaksananya temu kemitraan antara UKM dengan PM/PB dan sosialisasi HCPM/HKI	UKM	53	53	100
26	Kemitraan Koperasi di bidang Produksi dan Aneka Usaha	107.845.200,00	106.040.600,00	98,33	Jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	Koperasi	60	60	100
27	Pengembangan Jaringan Usaha dan Promosi Produk Unggulan Koperasi	123.272.900,00	115.725.850,00	93,88	Terlaksananya promosi produk unggulan koperasi/anggota koperasi	Koperasi	3	3	100



No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	107.530.000,00	105.088.480,00	97,73	Terlaksananya diklat bagi pengurus, pengelola KUKM	Unit	50	50	100
29	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM KUKM	5.000.000.000,00	4.839.404.900,00	96,79	Terlaksananya diklat bagi pengurus, pengelola koperasi dan UKM	Orang	1200	1200	100
	JUMLAH PROGRAM : 6								
	JUMLAH KEGIATAN : 29	9.803.786.120,00	9.393.298.382,00	95,81					



Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2017 (dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2.6) adalah :

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- h) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
- i) Kegiatan Upacara Keagamaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Pembinaan UKM Akses Sumber Pembiayaan

Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah pelaku UMKM dalam mengakses permodalan tersebut memanfaatkan program yang diluncurkan Pemerintah Pusat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemanfaatan KUR tersebut oleh UMKM karena mendapat informasi secara terus menerus oleh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan proposal usaha. Dukungan capaian indikator kinerja tersebut melalui



pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif pada kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- a) Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Koperasi
- b) Kegiatan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi

5. Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi

- a) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
- b) Kegiatan Dukungan Penguatan Peran Dekopinwil Provinsi Bali
- c) Kegiatan Pembinaan dan Penghargaan Koperasi

6. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UKM
- c) Kegiatan Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah
- d) Kegiatan Kemitraan Koperasi di bidang Produksi dan Aneka Usaha
- e) Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha dan Promosi Produk Unggulan Koperasi
- f) Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD
- g) Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM KUKM

b. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi

2. Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi

- a) Kegiatan Dukungan Penguatan Peran Dekopinwil Provinsi Bali

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- a) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi

4. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Kegiatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah
- b) Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha
- c) Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD
- d) Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM KUKM

c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Akses koperasi terhadap terhadap skim kredit di bank sudah mulai meningkat, disamping itu adanya dana penguatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali sudah mulai dimanfaatkan oleh koperasi sebagai sumber permodalannya dan adanya Lembaga Penjamin Kredit Bali Mandara (Jamkrida Bali Mandara) untuk menjamin kredit yang diajukan oleh koperasi.
2. Keinginan masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami tentang perkoperasian. Namun demikian, pemerintah menginginkan tumbuh berkembangnya koperasi nantinya diikuti dengan adanya peningkatan dari kualitas koperasi itu sendiri.
3. Dukungan dari berbagai sektor baik dari pemerintah, dunia usaha, perbankan dan BUMN untuk menjadi mitra kerja KUKM dari segi permodalan maupun pemasaran melalui Temu Kemitraan dan Promosi Produk KUKM. Pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut dimaksudkan agar terjalin kerjasama antara KUKM dengan dunia usaha, perbankan dan BUMN melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jaringan/Kemitraan Usaha dan Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
4. Adanya dukungan pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah pada kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Memperbaiki pola penganggaran, indikator kinerja dan target sasaran agar realistis dan tercapai. Data hasil evaluasi disajikan dalam lampiran 1 tabel 2.6 terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tergolong baik, walau secara umum Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.393.298.382,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) atau 95,81% dari

target Rp. 9.803.786.120,00 (sembilan milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, sedangkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 IKK sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.6. jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2017

No	Indikator	SPM/ Stradard Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan	-	√	3,70	4,00	-**	-**	8,00	-	4,4	4,84	
	Persentase UKM yang mendapat pembiayaan	-	√	8,00	10,00	-**	-**	8,00	-	11,00	12,10	
	Jumlah peningkatan koperasi berprestasi	-	√	18	18	20	22	36	-	22	24	
	Jumlah KUKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya	-	√	56	70	77	85	63	-	85	94	
	Jumlah peningkatan koperasi	-	√	100	100	167	167	106	-	184	202	
	Jumlah koperasi yang SDM Pengelolanya berkompeten	-	√	450	550	650	650	550	-	715	787	

** catatan : tanda (-) pada tabel menunjukkan perbedaan indikator antara Renstra 2013-2018 dengan Renstra terbaru 2019-2023, dari persentase menjadi jumlah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Adapun Isu-isu yang berkembang pada tahun 2017 berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya



- b. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan
- c. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha
- d. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan Koperasi dan UKM jalan di tempat.

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mampu mengatasi hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat daerah yaitu :
 - Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi
 - Meningkatkan penumbuhan dan pengembangan UKM dengan melaksanakan penyuluhan perkoperasian, bimtek/diklat perkoperasian dan kewirausahaan serta peningkatan akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil Koperasi dan UKM.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :
 - Belum optimalnya sinergitas program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang mengakibatkan belum optimalnya dalam pencapaian tujuan program/kegiatan
 - Masih lemahnya kerjasama lintas sektor dan belum optimalnya koordinasi program kegiatan pembinaan dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengakibatkan belum optimalnya pencapaian sasaran dalam peningkatan pertumbuhan Koperasi dan UMKM, belum maksimalnya Koperasi dan UMKM mendapat pembiayaan, belum maksimalnya KUMKM melaksanakan mitra bisnis dengan BUMN/BUMD, serta masih terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UMKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan Koperasi dan UMKM jalan ditempat
 - Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang menyebabkan Koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) : Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam



perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program prioritas di tahun 2017 dalam upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam membuka lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berdampak di berbagai sektor, yaitu :

- Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berdampak langsung kepada Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya yaitu adanya dana penguatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu Lembaga Penjaminan Kredit Bali Mandara.
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi yang berkualitas sehat akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan menjadikan Provinsi Bali yang mendapat predikat Provinsi Penggerak Koperasi.
 - Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi dengan tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor koperasi dan UMKM.
 - Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan program ini telah terwujudnya kemitraan KUKM serta SDM pengelola Koperasi yang berkualitas.
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:
- Koperasi dan UKM di Bali belum semuanya memiliki modal yang kuat untuk memproduksi secara berkelanjutan dan lemahnya mengakses permodalan, teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi masih sederhana dan tradisional serta lemahnya bidang pemasaran produk, pengetahuan dan pemahaman pegawai koperasi dan UKM masih terbatas.
 - Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dan dunia usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM serta kemitraan usaha antara Koperasi dan UKM dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar.
 - Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tentang dana penguatan modal bagi KUKM Provinsi Bali dan penjaminan kredit merupakan peluang peningkatan kegiatan dibidang permodalan.
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
- Dalam perbaikan perencanaan program pada RPJMD 2018-2023 yang akan datang menyampaikan usulan kepada Kepala Daerah terpilih agar program-program yang menyentuh



masyarakat khususnya pemberdayaan, perlindungan dan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Renja

Adanya penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) melalui Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 maka disusunlah Rancangan Akhir Renja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan beberapa perubahan antara lain : Rancangan Akhir Renja terdapat 5 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan untuk Dinas dan 1 (satu) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan untuk UPT setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan dengan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang jauh berbeda dengan usulan Rancangan Renja dan adanya penggabungan program di sekretariat dari 2 (dua) program menjadi 1 (satu) program. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali digabung menjadi satu program dengan nama Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali digabung menjadi satu program dengan nama Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM. Selain itu, terdapat beberapa perubahan nama program di beberapa bidang yaitu, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berubah menjadi Program Peningkatan Pengawasan Koperasi, Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi berubah menjadi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi. Pada Rancangan Renja kegiatan Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM yang terdapat pada program UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali semula digabung dalam Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, di Rancangan Akhir kegiatan Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM terpisah dengan Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjadi Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Konsultasi Publik ada beberapa usulan masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis dimasukkan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

** Catatan Penting : Saat Forum Konsultasi Publik tidak ada saran dan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2018 berakhir masa berlakunya RPJMD Provinsi Bali 2014-2018, oleh karena itu penyusunan tujuan dan sasaran diperlukan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Selanjutnya bab III Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan.

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan sasaran Pembangunan Nasional periode 2015-2019 Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM RI periode 2015-2019 sebagai berikut:

Visi : “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk berkontribusi dalam Perekonomian Nasional.

Misi : Untuk mewujudkan Visi di atas, maka Misi yang tepat melalui 3 (tiga) Misi Pembangunan yaitu:

- Mewujudkan kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas
- Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan
- Mewujudkan koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional serta prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sehingga ada keterpaduan antara prioritas pembangunan Kementerian dengan Dinas menjawab dengan program unggulan yaitu :

- a. Program Peningkatan Pengawasan Koperasi
- b. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
- c. Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi
- d. Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e. Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM



2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Bali 2014-2018, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali maka, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya koperasi yang berprestasi
- b. Terwujudnya pertumbuhan koperasi
- c. Terwujudnya Koperasi dan UKM yang meningkat modal usahanya
- d. Terwujudnya kemitraan KUKM dan SDM pengelola koperasi yang berkualitas

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
- b. Meningkatnya kuantitas kelembagaan koperasi
- c. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi
- d. Meningkatnya iklim usaha dan pengembangan KUMKM

3) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan program dan kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Renja, baik jenis program/kegiatan.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019

No	Program/Kegiatan
I	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan alat tulis kantor
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
9	Upacara keagamaan
10	Pengadaan peralatan gedung kantor
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas



12	Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
II	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi
1	Penilaian Kesehatan Koperasi
2	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi
3	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
III	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
1	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
2	Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi
3	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi
IV	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi
1	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi
2	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha
3	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi
V	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3	Peningkatan Akses Perizinan dan Pembinaan UMKM
4	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
VI	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7	Penyediaan Makanan dan Minuman
8	Upacara Keagamaan
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
12	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM
13	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM
14	Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi
	JUMLAH PROGRAM : 6
	JUMLAH KEGIATAN : 41



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terlampir dalam lampiran 3.



BAB V PENUTUP

Demikianlah Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 disusun dengan beberapa hasil review menyesuaikan dengan temuan-temuan setelah proses penyesuaian pagu indikatif yang diberikan antara lain :

1. Rancangan Akhir Renja terdapat 5 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan untuk Dinas dan 1 (satu) program dengan 14 (empat belas) kegiatan untuk UPT setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan dengan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang jauh berbeda dengan usulan Rancangan Renja dan adanya penggabungan program di bidang Sekretariat dari 2 (dua) program menjadi 1 (satu) program. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan digabung menjadi satu program dengan nama Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali digabung menjadi satu program dengan nama Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM.
2. Perubahan nama program di beberapa bidang yaitu, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berubah menjadi Program Peningkatan Pengawasan Koperasi, Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi berubah menjadi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.
3. Dalam Rancangan Renja kegiatan Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM yang terdapat pada program UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali semula digabung dalam Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, di Rancangan Akhir kegiatan Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM terpisah dengan Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjadi Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM.



Semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019. Terima kasih.

Denpasar, Juli 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali

I Gede Indra Dewa Putra, SE.,MM.

Pembina Tk. I

NI



Lampiran 1

Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-			Urusan Pilihan							
-	01		Koperasi dan UKM							
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas	Koperasi	48 unit	18 unit	36 unit	200		
		Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	KSP/USP	-	38 Koperasi				
		Pemantauan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi	Koperasi		10 Koperasi				
		Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan Koperasi	Koperasi		42 Koperasi				
		Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Peningkatan Koperasi	Koperasi	341 Koperasi	100 Koperasi	106 Koperasi	106		
		Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Datanya Dimutahirkan	Koperasi		40 Koperasi				
		Dukungan Penguatan Peran Dekopinwil Provinsi Bali	Jumlah Koperasi Binaan Dekopinwil	Koperasi		110 Koperasi				



				Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi yang Berkinerja dengan Baik	yang terbina Jumlah Koperasi yang berkinerja dengan baik	Koperasi							
				Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah	Persentase Koperasi yang Mendapat Pembiayaan	%	9,43	3,70	3,80	103			
				Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat Pembiayaan	Koperasi		50 Koperasi					
				Evaluasi UKM Akses Sumber Pembiayaan	Persentase UKM yang mendapat Pembiayaan	%	36,56	8,00	8,00	100			
				Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi usaha Kecil Menengah	Jumlah KUKM yang Bermitra dengan Lembaga Bisnis Lainnya	Unit	94	56 Unit	63 Unit	112,5			
				Penumbuhan dan Pengembangan Usaha kecil Menengah	Jumlah Penumbuhan UKM	Unit		140 UKM					
				Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah Koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	Koperasi		60 Koperasi					
				Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang bermitra dan produknya dikenal	Unit		-					
				Perlindungan dan Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang memahami HCPM/HKI	Unit		-					
				Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Jumlah produk unggulan Koperasi/anggota Koperasi yang dikenal	Produk		3 Koperasi/Anggota					
				Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten	Unit	500 Unit	450 Unit	550 Unit	122,2			
				Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	Jumlah Pengelola KUKM yang mengikuti diklat	Unit		50 Unit					



Lamran 2.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019

No	Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang ditangani	100%	624.414.000,00	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	82,15	2.161.826.400,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah surat menyurat yang tertangani	350 lembar	1.260.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah meterai yang disediakan	250 lembar	1.260.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik	12 bulan	210.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	3 jenis	210.000.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Denpasar	Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi, terpenuhinya administrasi kantor	12 bulan	50.500.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Denpasar	Jumlah jenis alat tulis kantor	37 jenis	50.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Pencetakan, penggandaan dan fotocopy surat-surat dapat dilaksanakan	12 bulan	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2 jenis	15.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Tersedianya komponen listrik	12 bulan	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah jenis instalasi listrik	17 jenis	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	27.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Jumlah jenis bahan bacaan	7 jenis	27.000.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Denpasar	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12.250.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Denpasar	Jumlah jenis makanan dan minuman	2 jenis	12.250.000,00	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Denpasar	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	12 bulan	223.404.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Denpasar	Jumlah jenis perjalanan dinas	2 jenis	319.100.000,00	
	Upacara Keagamaan	Denpasar	Terlaksananya upacara agama	12 bulan	75.000.000,00	Upacara Keagamaan	Denpasar	Jumlah jenis upacara keagamaan	18 jenis	75.000.000,00	
	Program Peningkatan		Persentase Peningkatan	100%	1.394.020.648,00	-	-	-	-	-	



Sarana dan Prasarana Aparatur		Sarana dan Prasarana Aparatur yang Ditangani									
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah bulan tersedianya peralatan gedung	12 bulan	646.967.152,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	3 jenis	353.822.992,00		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Denpasar	Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan baik	12 bulan	25.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	25.000.000,00		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Denpasar	Penyediaan jasa cleaning service dan kebersihan kantor	12 bulan	250.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	425.886.496,00		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Denpasar	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak	12 bulan	472.053.496,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Denpasar	Jumlah jenis kendaraan dinas	2 jenis	619.139.096,00		
-	-	-	-	-	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	116.244.332,00		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas	367 unit	800.000.000,00	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi		Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas	210 unit	381.935.798,00		
Penilaian Kesehatan Koperasi	9 Kab/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	150 unit	200.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	135 unit	166.481.782,00		
Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	9 Kab/Kota	Terlaksananya kepatuhan dan penerapan sanksi	150 unit	200.000.000,00	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	50 unit	121.181.900,00		
Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	9 Kab/Kota	Terlaksananya pemeriksaan kelembagaan koperasi	167 unit	400.000.000,00	Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	25 unit	94.272.116,00		
Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi		Jumlah kelompok masyarakat/anggota koperasi yang mendapat penyuluhan dan jumlah koperasi yang izinnya diverifikasi	364 unit	1.325.000.000,00	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi		Jumlah kelompok masyarakat/anggota koperasi yang mendapat penyuluhan dan jumlah koperasi yang izinnya diverifikasi	50 Unit	340.138.630,00		
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Kab/Kota se- Bali	Terlaksananya pemutakhiran data koperasi binaan provinsi	167 unit	325.000.000,00	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	9 kabupaten/kota	Terlaksananya pemutakhiran data koperasi	20 unit	123.638.832,00		
Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi	Kab/Kota se- Bali	Terlaksananya penyuluhan dan verifikasi izin	30 unit	350.000.000,00	Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi	9 kabupaten/kota	Penumbuhan dan pengembangan koperasi	17 unit	224.670.164,00		



	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Kab/Kota se- Bali	Peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	167 unit	650.000.000,00	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	9 kabupaten/kota	Peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	15 unit	157.373.466,00	
	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi		Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	717 unit	1.850.000.000,00	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi		Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	104 unit	394.330.798,00	
	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	Provinsi, 9 Kab/Kota	Terlaksananya temu konsultasi program perkuatan permodalan bagi koperasi	167 unit	350.000.000,00	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	6 kabupaten	Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	50 unit	223.424.416,00	
	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Provinsi, 9 Kab/Kota	Terlaksananya temu kemitraan koperasi dengan BUMN/BUMD/Swasta	500 unit	500.000.000,00	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	6 kabupaten	Jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	50 unit	74.374.416,00	
	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Provinsi, 9 Kab/Kota	Terlaksananya pemasaran produk unggulan koperasi	50 unit	1.000.000.000,00	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	6 kabupaten	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	4 unit	96.531.966,00	
	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya dan jumlah KUMKM yang mendapat pendampingan konsultan PLUT	1.675 UMKM	3.200.000.000,00	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya dan jumlah KUMKM yang mendapat pendampingan konsultan PLUT	204 UMKM	924.792.710,00	
	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Kab/Kota se- Bali	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek peningkatan UMKM	450 UMKM	500.000.000,00	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	6 kabupaten	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	70.159.416,00	
	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah	Kab/Kota se- Bali	Terlaksananya kemitraan dan jejaring dalam bidang pemasaran serta terpromosinya produk UMKM Bali dan terdampingnya pengembangan usaha KUMKM serta terciptanya kinerja konsultan pendamping sesuai kompetensi bidang masing-masing	325 UMKM	500.000.000,00	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah	6 kabupaten	Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dan difasilitasi pameran	104 UMKM	771.628.878,00	
	Peningkatan Akses Perizinan dan Pembinaan UMKM	Kab/Kota se- Bali	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan bagi UMKM	450 UMKM	500.000.000,00	Peningkatan Akses Perizinan dan Pembinaan UMKM	6 kabupaten	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi akses perizinan dan mendapat pembinaan	25 UMKM	60.159.416,00	



	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	Kab/Kota se- Bali	Terlaksananya sosialisasi akses sumber pembiayaan	450 UMKM	500.000.000,00	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	1 kabupaten	Jumlah UMKM yang mendapat akses pembiayaan	25 UMKM	22.845.000,00	
	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi		Jumlah SDM Koperasi yang berkompeten	650 KUKM	1.450.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Kab/Kota se- Bali	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang kapasitasnya meningkat	125 KUKM	250.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Diklat Berbasis Kompetensi bagi SDM KSP/USP	Kab/Kota se- Bali	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang kapasitasnya meningkat	125 KUKM	250.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Diklat Berbasis Gender	Kab/Kota se- Bali	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang kapasitasnya meningkat	75 KUKM	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
		Kab/Kota se- Bali	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang kapasitasnya meningkat	75 KUKM	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
		Kab/Kota se- Bali	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang kapasitasnya meningkat	125 KUKM	250.000.000,00	-	-	-	-	-	
		Kab/Kota se- Bali	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang kapasitasnya meningkat	50 KUKM	250.000.000,00	-	-	-	-	-	
		Kab/Kota se- Bali	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang kapasitasnya meningkat	75 KUKM	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM		Jumlah SDM KUKM yang berkompeten	50 KUKM	5.856.773.248,00	
	-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah meterai	75 lembar	315.000,00	
	-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	3 jenis	31.910.000,00	
	-	-	-	-	-	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah jenis ATK	28 jenis	3.939.000,00	
	-	-	-	-	-	Penyediaan Barang Cetak dan		Jumlah lembar foto copy dan dokumentasi	6300 lembar	1.260.000,00	



						Penggandaan					
	-	-	-	-	-	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis instalasi	10 jenis	2.027.000,00	
	-	-	-	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah jenis bahan bacaan	1 jenis	840.000,00	
	-	-	-	-	-	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah jenis makanan dan minuman	2 jenis	2.625.000,00	
	-	-	-	-	-	Upacara Keagamaan		Jumlah jenis upacara keagamaan	5 jenis	18.000.000,00	
	-	-	-	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah jenis jasa pemeliharaan gedung kantor dan jasa keamanan	3 jenis	161.685.000,00	
	-	-	-	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	43.314.416,00	
	-	-	-	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4 jenis	7.525.000,00	
	-	-	-	-	-	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM		Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	1 dokumen	6.000.000,00	
	-	-	-	-	-	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Denpasar	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUKM	108.502.832,00	
						Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi	Denpasar	Jumlah pengurus, pengawas, dan pengelola KUKM yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	1470 orang	5.468.830.000,00	



Lampiran 3.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.368.568.168,00			35.943.802.531,00
2.11.2.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja				2.161.826.400,00			2.897.485.756,00
		Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)		82,15	2.161.826.400,00		82,50	2.897.485.756,00
2.11.2.11.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana	Denpasar		1.260.000,00			1.764.000,00
		Output : Jumlah materai yang disediakan		250 lembar			350 lembar	
		Outcome : Persentase administrasi perkantoran		100%				
2.11.2.11.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana	Denpasar		210.000.000,00			269.292.000,00
		Output : Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik		3 jenis			3 jenis	
		Outcome : Persentase operasional kantor		100%				
2.11.2.11.01.01.01.06.	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		50.500.000,00			60.276.800,00
		Output : Jumlah jenis alat tulis kantor		37 jenis			40 jenis	
		Outcome : Persentase administrasi perkantoran		100%				
2.11.2.11.01.01.01.07.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		15.000.000,00			18.012.000,00
		Output : Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan		2 jenis			2 jenis	



		Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan			
2.11.2.11.01.01.01.08.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		10.000.000,00		13.432.400,00
		Output : Jumlah jenis instalasi listrik		17 jenis		20 jenis	
		Outcome : Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran tugas kantor		100%			
2.11.2.11.01.01.01.10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		27.000.000,00		30.708.000,00
		Output : Jumlah jenis bahan bacaan		7 jenis		7 Jenis	
		Outcome : Persentase perolehan informasi		100%			
2.11.2.11.01.01.01.11.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Denpasar		12.250.000,00		16.625.000,00
		Output : Jumlah makanan dan minuman yang dipesan (kotak)		2 jenis		2 jenis	
		Outcome : Jumlah jenis makanan dan minuman		100%			
2.11.2.11.01.01.01.12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Input : Jumlah Dana	Denpasar		319.100.000,00		365.385.600,00
		Output : Jumlah jenis perjalanan dinas		2 jenis		2 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional		100%			
2.11.2.11.01.01.01.13.	Upacara Keagamaan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		75.000.000,00		104.100.000,00
		Output : Jumlah jenis upacara keagamaan		18 jenis		18 jenis	
		Outcome : Terwujudnya hubungan harmonis dan kedamaian rohani dalam pelaksanaan tugas		100%			
2.11.2.11.01.01.01.16.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		353.822.992,00		711.663.867,00
		Output : Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor		3 jenis		3 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor		100%			
2.11.2.11.01.01.01.18.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		425.886.496,00		511.063.795,00
		Output : Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		3 jenis		3 jenis	
		Outcome : Persentase kenyamanan gedung kantor		100%			
2.11.2.11.01.01.01.19.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Input : Jumlah Dana	Denpasar		520.762.580,00		619.139.096,00
		Output : Jumlah jenis kendaraan dinas		2 jenis		2 jenis	



2.11.2.11.01.01.01.27.	Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor Input : Jumlah Dana	Denpasar	100%	116.244.332,00		139.493.198,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan		2 dokumen		2 dokumen	
		Outcome : Pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan capaian kinerja		2 dokumen			
2.11.2.11.01.01.01.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		25.000.000,00		36.530.000,00
		Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		2 jenis		2 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor		100%			
2.11.2.11.01.01.05.	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi				381.935.798,00		461.635.023,00
		Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas		210 Unit	381.935.798,00	217 Unit	461.635.023,00
2.11.2.11.01.01.18.14.	Penilaian Kesehatan Koperasi	Input : Jumlah Dana	9 Kab/Kota		166.481.782,00		189.989.473,00
		Output : Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya		135 Unit		140 Unit	
		Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berprestasi		135 Unit			
2.11.2.11.01.01.18.18.	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	Input : Jumlah Dana	9 Kab/Kota		121.181.900,00		133.379.780,00
		Output : Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi		50 Unit		52 Unit	
		Outcome : Meningkatnya koperasi yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi		50 Unit			
2.11.2.11.01.01.18.19.	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Input : Jumlah Dana	9 Kab/Kota		94.272.116,00		138.265.770,00
		Output : Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya		25 Unit		28 Unit	
		Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang memperoleh/memiliki NIK		25 Unit			
2.11.2.11.01.01.06.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi				505.682.462,00		609.182.550,00
		Jumlah kelompok masyarakat/anggota koperasi yang mendapat penyuluhan dan jumlah koperasi yang izinnya diverifikasi		50 Unit	505.682.462,00	58 Unit	609.182.550,00
2.11.2.11.01.01.06.01.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Input : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		123.638.832,00		149.602.987,00
		Output : Terlaksananya pemutakhiran data koperasi		20 Unit		22 Unit	
		Outcome : Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan		20 Unit			
2.11.2.11.01.01.06.02	Penyuluhan dan Pengembangan koperasi	Input : Jumlah Dana	kabupaten/kota		224.670.164,00		269.551.204,00



		Output : Penumbuhan dan pengembangan koperasi		17 Unit			19 Unit	
		Outcome : Terbinanya koperasi sesuai jatidiri dan prinsip koperasi binaan Provinsi Bali		17 Unit				
2.11.2.11.01.01.20.06.	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Input : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		157.373.466,00			190.028.359,00
		Output : Peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi		15 Unit			17 Unit	
		Outcome : Jumlah koperasi yang kelembagaan dan usaha meningkat kinerjanya		15 Unit				
2.11.2.11.01.01.07.	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi				394.330.798,00			475.499.202,00
		Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta		104 unit	394.330.798,00		104 Unit	475.499.202,00
2.11.2.11.01.01.07.01..	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	Input : Jumlah Dana	6 Kabupaten		223.424.416,00			246.920.229,00
		Output : Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan		50 Unit			50 Unit	
		Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapat permodalan		50 Unit				
2.11.2.11.01.01.07.02.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Input : Jumlah Dana	6 Kabupaten		74.374.416,00			98.174.229,00
		Output : Jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta		50 Unit			50 Unit	
		Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta		50 Unit				
2.11.2.11.01.01.07.03.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Input : Jumlah Dana	6 Kabupaten		96.531.966,00			130.404.744,00
		Output : Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal		4 Unit			4 Unit	
		Outcome : Meningkatnya jumlah produk unggulan koperasi		4 Unit				
2.11.2.11.01.01.08.	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				924.792.710,00			1.500.000.000,00
		Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya dan jumlah KUMKM yang mendapat pendampingan konsultan PLUT		204 UMKM	924.792.710,00		215 UMKM	1.500.000.000,00
2.11.2.11.01.01.08.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Input : Jumlah Dana	1 Kabupaten		70.159.416,00			100.000.000,00
		Output : Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha		50 UMKM			50 UMKM	
		Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM		50 UMKM				
2.11.2.11.01.01.08.02	Pengembangan Pemasaran Produk dan	Input : Jumlah Dana			771.628.878,00			1.200.000.000,00



	Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Output : Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dan difasilitasi pameran		104 UMKM			110 UMKM	
		Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang difasilitasi temu mitra dan pameran		104 UMKM				
2.11.2.11.01.01.08.03.	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	Input : Jumlah Dana	6 Kabupaten		60.159.416,00			100.000.000,00
		Output : Jumlah sosialisasi dan pembinaan bagi UMKM		25 UMKM			25 UMKM	
		Outcome : Meningkatnya pemahaman UMKM tentang HCPM/HKI		25 UMKM				
2.11.2.11.01.01.08.04.	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	Input : Jumlah Dana	6 Kabupaten		22.845.000,00			100.000.000,00
		Output : Jumlah UMKM yang mendapat akses pembiayaan		25 UMKM			30 UMKM	
		Outcome : Meningkatnya UMKM yang mendapat pembiayaan		25 UMKM				
	TOTAL				4.368.568.168,00			5.943.802.531,00



**Tabel Lanjutan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020**

Organisasi/Sub PD :2.11.01.02 – UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.856.773.248,00			6.065.567.897,00
2.11.2.11.01.02.09.	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM				5.856.773.248,00			6.065.567.897,00
		Jumlah SDM KUKM yang berkompeten		50 KUKM	5.856.773.248,00		50 KUKM	6.065.567.897,00
2.11.2.11.01.02.09.01..	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana	Denpasar		315.000,00			378.000,00
		Output : Jumlah materi		75 lembar			80 lembar	
		Outcome : Persentase kelancaran administrasi perkantoran		100%				
2.11.2.11.01.02.09.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana	Denpasar		31.910.000,00			38.292.000,00
		Output : Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik		3 jenis			3 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor		100%				
2.11.2.11.01.02.09.03.	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		3.939.000,00			4.762.800,00
		Output : Jumlah jenis ATK		28 jenis			30 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran administrasi perkantoran		100%				
2.11.2.11.01.02.09.04..	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		1.260.000,00			1.512.000,00
		Output : jumlah lembar foto copy		6.300 lembar			6.300 lembar	
		Outcome : Persentase kelancaran administrasi perkantoran		100%				
2.11.2.11.01.02.09.05	Penyediaan komponen instalasi	Input : Jumlah Dana	Denpasar		2.027.000,00			2.432.400,00



	listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah jenis instalasi		10 jenis			12 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional perkantoran		100%				
2.11.2.11.01.02.09.06.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		840.000,00			1.008.000,00
		Output : Jumlah jenis bahan bacaan		1 jenis			2 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor		100%				
2.11.2.11.01.02.09.07.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Denpasar		2.625.000,00			3.150.000,00
		Output : Jumlah jenis makanan dan minuman		2 jenis			2 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran administrasi kantor		100%				
2.11.2.11.01.02.09.08	Upacara Keagamaan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		18.000.000,00			21.600.000,00
		Output : Jumlah jenis upacara keagamaan		5 jenis			5 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor		100%				
2.11.2.11.01.02.09.09.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		161.685.000,00			194.022.000,00
		Output : Jumlah jenis jasa pemeliharaan gedung kantor dan jasa keamanan		3 jenis			3 jenis	
		Outcome : Persentase kenyamanan kantor		100%				
2.11.2.11.01.02.09.10.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Input : Jumlah Dana	Denpasar		43.314.416,00			51.977.299,00
		Output : Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara		2 jenis			2 jenis	
		Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor		100%				
2.11.2.11.01.02.09.11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Denpasar		7.525.000,00			9.030.000,00
		Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		4 jenis			4 jenis	
		Outcome : Pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan capaian kinerja		100%				
2.11.2.11.01.02.09.12..	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	Input : Jumlah Dana	Denpasar		6.000.000,00			7.200.000,00
		Output : Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM		1 dokumen			1 dokumen	
		Outcome : Data laporan program tahun 2019		1 dokumen				
2.11.2.11.01.02.09.13	Diklat Manajemen Pengelolaan	Input : Jumlah Dana	Denpasar		5.468.830.000,00			5.600.000.000,00



	KUKM	Output : Jumlah pengurus, pengawas, dan pengelola KUKM yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas koperasi dan UKM		1470 orang			50 KUKM	
		Outcome : Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola KUKM dalam pengelolaan usaha		100%				
	TOTAL				5.856.773.248,00			6.065.567.897,00